



Industri Pariwisata Jogja

Sumber Ketidakadilan
Sosial-Ekologis

WALHI
YOGYAKARTA

Industri Pariwisata Jogja

**Sumber Ketidakadilan
Sosial-Ekologis**

Muhamad Nasihudin
Dimas Ramadhan P.
Elki Setiyo Hadi
Rizki Abiyoga
Rakli Piscae

Industri Pariwisata Jogja

Sumber Ketidakadilan Sosial-Ekologis

Tim Penulis:

Muhamad Nasihudin
Dimas Ramadhan P.
Elki Setiyo Hadi
Rizki Abiyoga
Rakli Piscae

Tim Penyelaras:

Dimas Ramadhan P.
Elki Setiyo Hadi

Layout & Cover:

Aziz Anshari

Penanggung Jawab:

Gandar Mahojwala

WALHI Yogyakarta	
Email	: yogyakarta@walhi.or.id
Whatsaap	: (+62) 881-2758-593
Instagram	: @pulihkanjogja
Website	: walhijogja.or.id
Alamat	: Wonocatur, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daftar Isi

Executive Summary Pulihkan Jogja: Industri Pariwisata Sebagai Sumber Ketidakadilan Sosial-Ekologis	v
Pertumbuhan Kapital Industri Pariwisata Jogja	1
Pertumbuhan Kapital Sektor Industri Pariwisata Jogja, Krisis dan (Ancaman) Ketidakadilan Sosial Ekologis	6
Ledakan Sampah Industri Wisata Jogja	10
Berlanjutnya Ketidakadilan Sosial-Ekologis di Sitimulyo	15
Kebebalan Pemerintah dan Upaya Mereplikasi Derita di Tempat Lain	22
Alih Fungsi Lahan Pantai Sanglen untuk Pembangunan Resort Obelix Beach Club di Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul.....	26
Ancaman Resort Jungwok Blue Ocean terhadap Akses Air Warga Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul	31

Executive Summary

Pulihkan Jogja: Industri Pariwisata Sebagai Sumber Ketidakadilan Sosial-Ekologis

Yogyakarta, sebagai destinasi wisata terbesar kedua setelah Bali, terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pengembangan sektor pariwisata. Kebijakan seperti Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (KSPN DIY) telah memprioritaskan pengembangan infrastruktur, diversifikasi destinasi wisata, dan peningkatan investasi. Data mencatat pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,05% pada kuartal ketiga 2024, didukung oleh lonjakan investasi hingga Rp 3,8 triliun.

Namun, keberhasilan ekonomi ini bertolak belakang dengan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, yang mencapai 10,83%, tertinggi di Pulau Jawa. Wilayah seperti Bantul dan Gunungkidul, yang menjadi pusat pariwisata, justru mencatatkan angka kemiskinan tertinggi. Hal ini mengindikasikan ketimpangan sosial-ekologis yang melibatkan eksploitasi lahan, tekanan lingkungan, dan pengabaian kebutuhan masyarakat lokal.

Pembangunan sektor pariwisata juga berdampak pada alih fungsi lahan hingga 200 hektar per tahun, meningkatnya limbah hotel dan restoran, serta masalah manajemen sampah yang belum teratasi

secara sistematis. Di sisi lain, keuntungan yang diperoleh dari pariwisata sebagian besar mengalir ke pemodal besar, sementara masyarakat lokal menghadapi degradasi lingkungan dan terbatasnya akses terhadap manfaat langsung.

Dokumen ini menyoroti bagaimana pola pembangunan kapitalistik sektor pariwisata di Yogyakarta memicu krisis sosial-ekologis, termasuk alih fungsi lahan, peningkatan limbah, dan pencemaran lingkungan. Dengan pendekatan berbasis teori krisis sosial-ekologis, laporan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan pariwisata.

Rekomendasi Utama:

1. Mengintegrasikan perspektif keadilan sosial-ekologis dalam kebijakan pengembangan pariwisata.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan manfaat ekonomi sektor pariwisata.
3. Menyusun mekanisme pengelolaan limbah yang lebih efektif, terutama dari sektor hotel dan restoran.
4. Melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi yang tidak terencana.

Dokumen ini menjadi refleksi dan panggilan aksi untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan sosial dan ekologi.

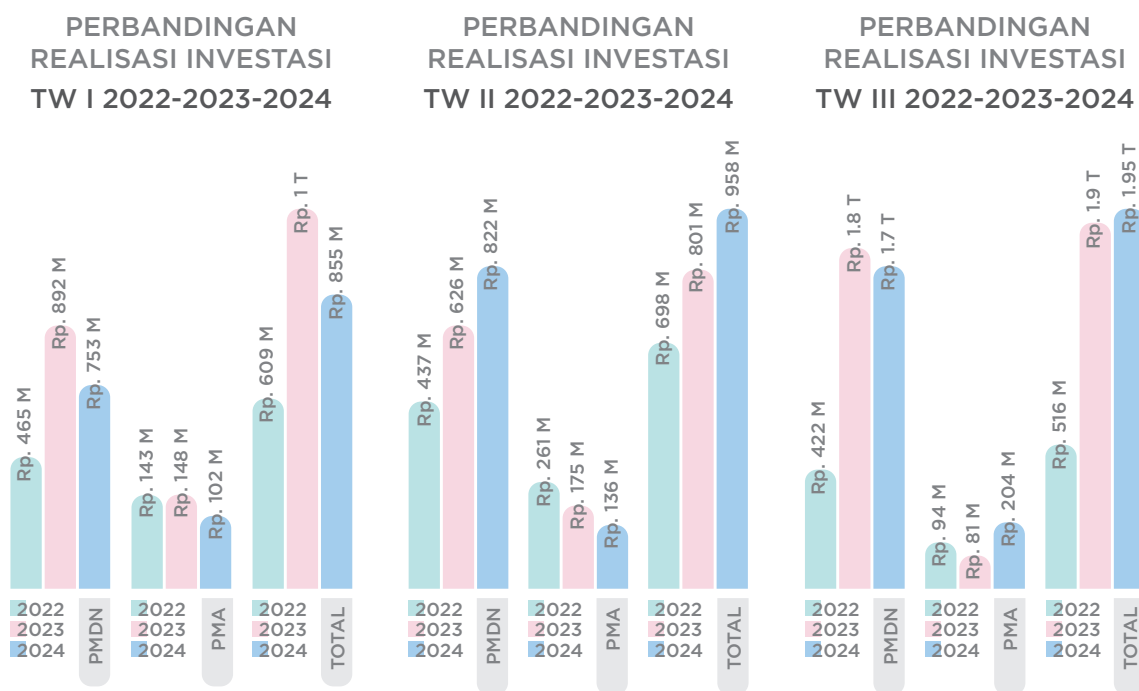
Industri Pariwisata Jogja dan Pertumbuhan Kapital

Bepredikat sebagai tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali¹, industri wisata Jogja terus berkembang pesat. Predikat itu juga telah menempatkan Jogja sebagai bagian dari tujuan destinasi wisata super prioritas Borobudur. Beragam kebijakan dikeluarkan pemerintah pusat untuk mengembangkan pariwisata di Jogja baik dalam bentuk infrastruktur maupun disverifikasi wilayah tujuan wisata. Misalnya, kebijakan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP)².

-
1. Fisipol, 2017, Tujuan Wisata Populer, Yogyakarta Patut Berbenah, dalam <https://fisipol.ugm.ac.id/tujuan-wisata-populer-yogyakarta-patut-berbenah/>, diakses pada 2 Januari 2025.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta.Prambanan Tahun 2024 – 2044.

Program DPN BYP merupakan kebijakan yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur, keterhubungan spasial, dan tata kelola serta manajemen wisata.³ Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan lain melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (KSPN DIY) yang berfokus pada lima kawasan strategis antara lain Gunungsewu di Gunungkidul, Merapi, Merbabu, dan Menoreh (3M), Prambanan dan Sekitarnya (Sleman), Pantai Selatan, serta Kota Yogyakarta dan Sekitarnya.⁴ Dua program itu mendorong pengembangan industri wisata Jogja yang tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi.⁵

Gambar 1: Data Realisasi Investasi



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

3. Lihat Ahsinin dkk., Memetakan Mozaik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Perspektif Bisnis dan HAM: Studi Empat Destinasi Bali Baru, Yesaya Sandang (ed.), (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2020)
4. Hery Sidik, 2019, Kemenpar: Lima destinasi DIY kawasan strategis pariwisata nasional, dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/1214391/kemenpar-lima-destinasi-diy-kawasan-strategis-pariwisata-nasional>, diakses pada 2 Januari 2025.
5. Lihat: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta.Prambanan Tahun 2024 – 2044.

Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jogja terus meningkat dari kuartal kedua sebesar 4,95% menjadi 5,05% di kuartal ketiga.⁶ Kenaikan lain juga terjadi pada jumlah penanaman modal/-investasi di Jogja, yaitu 1,8 triliun di tahun 2022, 3,7 triliun di tahun 2023 dan 3,8 triliun di tahun 2024.⁷ Menurut Agus Priono, Kepala DMPST DIY, salah satu factor terjadinya lonjakan investasi adalah "Pembangunan infrastruktur yang terus pemerintah kerjakan untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis dan sektor pariwisata."⁸

Gambar 2: Jumlah Persebaran dan Total Penduduk Miskin di Jogja

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Yogyakarta	31,62	34,07	29,68	29,48	28,78
Sleman	99,78	108,93	98,92	97,5	97,95
Bantul	138,66	146,98	130,13	128,51	126,94
Kulon Progo	78,06	81,14	72,21	70,74	71,49
Gunungkidul	127,61	135,33	122,82	122,54	120,42
Total	475,73	506,45	453,76	448,77	445,59

Sumber: Bappeda DIY, 2024

-
6. Badan Pusat Statistik DIY, 2024, Pertumbuhan Ekonomi Diy Triwulan I, II, III 2024, dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1596/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-i-2024.html>; <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/1598/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-iii-2024.html>, diakses 2 Januari 2025.
 7. Admin DPMPTSP DIY, 2024, Potret Realisasi Investasi DIY TW I, II, III, dalam <https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/web/11699/potret-realisasi-investasi-diy-tw-1-2024/>; <https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/web/11948/potret-realisasi-investasi-diy-tw-ii-2024/>; <https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/web/11995/potret-realisasi-investasi-diy-triwulan-iii-0-2024/>, diakses 2 Januari 2025.
 8. Yosef Leon, Investasi di DIY Melejit, Lampau Target Nasional, dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/12/19/510/1198454/investasi-di-diy-melejit-lampau-target-nasional>, diakses 2 Januari 2025.

Namun, lesatan pertumbuhan ekonomi juga dibarengi dengan angka kemiskinan Jogja yang tinggi se-pulau Jawa. Catatan Bappeda DIY menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jogja telah mencapai 445.550 jiwa dari total 3.386.243 jiwa atau 10,83 persen dari total penduduk Jogja. selama lima tahun terakhir, Bantul dan Gunungkidul menjadi dua wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jogja.⁹ Padahal, dua wilayah itu merupakan daerah pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi yang terus meroket berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang tinggi se-pulau Jawa di Jogja?

Untuk memahami masalah tersebut, kita perlu melihat, apa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal/investasi adalah dua hal yang saling terikat. Tanpa pertumbuhan investasi/modal, pemerintah tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi. Hitungan pertumbuhan ekonomi diambil dari jumlah keuntungan yang didapat oleh berbagai sektor usaha milik investor/pemodal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah pertumbuhan kapital karena ukuran pertumbuhan ekonomi adalah bermacam peningkatan dari pendapatan riil di periode tertentu yang bersumber dari macam-macam sektor kapitalisme, misalnya transportasi, telekomunikasi, properti, industri pertambangan, dan lain sebagainya,¹⁰ termasuk industri pariwisata Jogja. Oleh karena pertumbuhan ekonomi dihitung dari sektor usaha milik para investor/pemodal, wajar jika kemiskinan di Jogja masih tinggi. *Lantas, bagaimana kontribusi pertumbuhan kapital di sektor industri wisata Jogja sepanjang tahun 2024?*

9. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024, Infografik Kemiskinan, <https://bappeda.-jogjaprovo.go.id/dataku/infografik/kemiskinan>, diakses pada 4 Januari 2025.

10. Lebih lengkap teori ini dapat dilihat di: Bosman Batubara dan Eka Handriana, 2021, *Urbaniisasi Sebagai Pabrik Krisis Sosial Ekologis: Berdialektika dengan Prisma 1971-2021*, dalam *Prisma*, Vol. 40, 2021, hal 49-68.

Laporan ini menyodorkan bermacam peristiwa yang terjadi di Jogja bersamaan dengan naiknya pertumbuhan kapital di sektor industri wisata Jogja selama 2024. Peristiwa-peristiwa itu ditemui kami (Walhi Jogja) dalam kerja-kerja advokasi selama 2024 di beberapa wilayah, yaitu Bantul, Kota Jogja, Sleman, dan Gunung Kidul. Laporan ini memahami sekumpulan peristiwa itu menggunakan perspektif teori krisis sosial ekologis. Bosman Batubara (2019) mengerjakan formulasi teori krisis sosial ekologis untuk menjelaskan bagaimana moda produksi kapitalisme selalu mensyaratkan masalah sosial dan ekologis agar sistem produksinya terus beroperasi.¹¹ Menurutnya, krisis sosial ekologis adalah segala masalah sosial dan ekologis yang hadir berbarengan dengan atau sebagai syarat pembangunan yang bercorak kapitalistik. Lebih lanjut Dia mengatakan bahwa krisis sosial ekologis selalu memuat ketidakadilan sosial ekologis, yaitu di satu sisi terdapat keuntungan yang terus didapat oleh pemodal dari proses eksploitasi nilai lebih waktu buruh dan apropriasi non buruh, di sisi lain terdapat buruh dan non buruh yang menderita karena dieksploitasi pemodal dibawah produksi yang kapitalistik.

11. Lebih detail teorisasi ini dapat dilihat di: Batubara B (2019) Krisis, Ketidakadilan, dan Keadilan Sosial-Ekologis. PRISMA 38(3): 66-84

Pertumbuhan Kapital Sektor Industri Pariwisata Jogja, Krisis dan (Ancaman) Ketidakadilan Sosial Ekologis

Pertumbuhan ekonomi/kapital sektor industri pariwisata Jogja terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi/kapital saling berkait kelindan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD akan meningkatkan pendapatan ekonomi/kapital.¹² Secara sederhana, PAD adalah “perolehan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan aturan perundang-undangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹³ Menurut golongannya, PAD terbagi atas empat jenis penerimaan, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisah, dan pendapatan asli daerah lain.

-
12. Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18

Dalam realisasinya, salah satu faktor yang memengaruhi PAD adalah Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah. PDRB berpengaruh besar terhadap PAD¹⁴, sehingga peningkatan nilai PDRB akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi. Kenaikan itu terlihat dari perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pariwisata Jogja dari tahun ke tahun. Selain itu basis pertumbuhan ekonomi/kapital setor pariwisata juga terlihat dari perilaku ekspor yang menjadi sumber utama pendapatan devisa negara. Misalnya berkunjungnya wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia secara otomatis harus lebih dahulu membeli mata uang negara (Rupiah) agar dapat mereka gunakan untuk melakukan jual beli produk di Indonesia.¹⁵

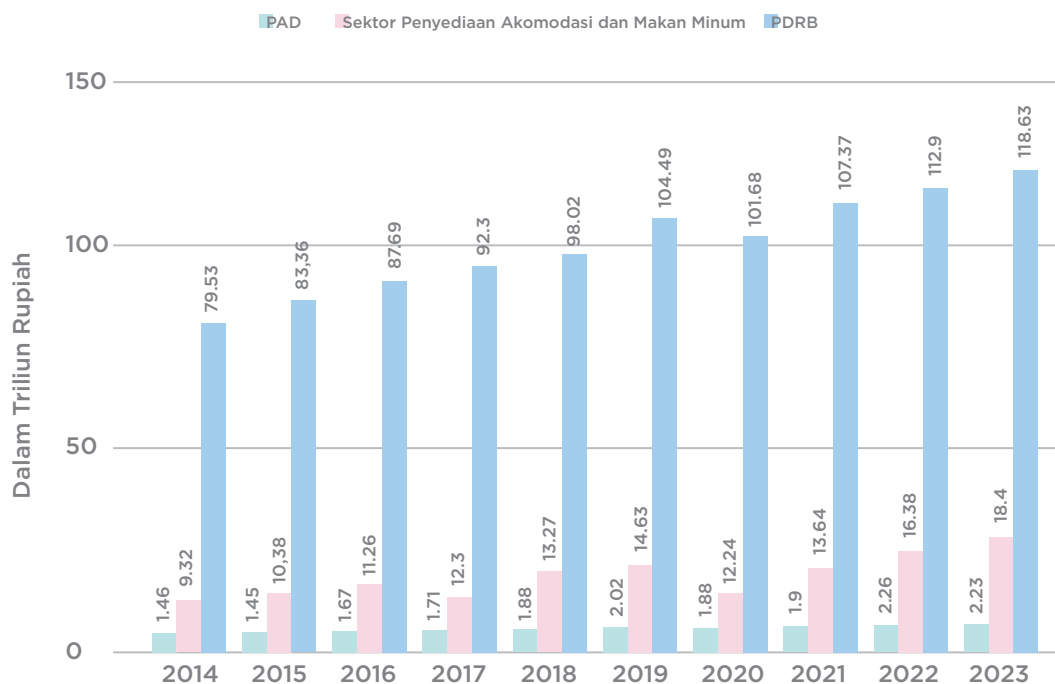
Di sektor industri pariwisata Jogja, nilai tambah PDRB direalisasikan melalui beberapa sumber, seperti penyediaan akomodasi dan makan minum. Data BPS menunjukkan terjadinya kenaikan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Jogja selama sepuluh tahun dari tahun 2014 sebesar 9,32 triliun menjadi Rp18,40 triliun pada 2023 dan menyumbang PDRB dari 79,53 triliun di 2014 menjadi 118,63 triliun di 2023.¹⁶

14. Saldi, A. H., Zulgani, Z., & Nurhayani, N. (2021). Analisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 201–210. <https://doi.org/10.22437/pd-pd.v10i3.16260>

15. Hakami, M. E. (2024). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

16. Jannatul L. Mustain, 2024, Menilik Ketimpangan Ekonomi di 'Daerah Istimewa' yang Tak Kunjung Reda, dalam <https://goodstats.id/article/menilik-ketimpangan-ekonomi-di-daerah-istimewadaerah-istimewa-yog-yakarta-atau-yang-sering-disebut-dengan-diy-merupakan-salah-satu-destinasi-wisata-utama-di-indonesi-yang-tak-kunjung-reda-TeAkb>, diakses pada 10 Januari 2025

KONDISI PEREKONOMIAN PROVINSI DI. YOGYAKARTA
TAHUN 2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah pendapatan itu dihasilkan dari banyaknya hotel dan tempat makan minum yang tersebar di kab/kota seluruh Jogja. Akomodasi hotel terus mengalami peningkatan dari 1696 hotel di tahun 2022, menjadi 1924 di tahun 2023, dan 2000 hotel dengan bermacam kelas di Jogja di tahun 2024.¹⁷ Sektor makan minum juga mengalami kenaikan dari 1535 tempat di tahun 2022 menjadi 1597 tempat di tahun 2023 dan 2024.¹⁸ Jumlah itu belum termasuk tempat makan dan minum yang bertempat di dalam hotel. Jumlah akomodasi hotel dan tempat makan-minum itu menjadi faktor penggerak industri wisata Jogja. Hotel dan tempat makan minum menjadi fasilitas yang tanpanya wisata Jogja tidak laku.

17. Jogja Dataku, Jumlah Hotel Pariwisata 2021-2024, dalam https://bappeda.jog-japrovo.go.id/-dataku/data_dasar?id_skpd=78, diakses pada 5 Januari 2025.

18. Jogja Dataku, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, dalam https://bappeda.jog-japrovo.go.id/-dataku/-data_dasar/cetak/218-restoran-dan-rumah-makan, diakses pada 5 Januari 2025.

Kenaikan PDRB di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terjadi karena didorong oleh jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat ke Jogja baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada 2024, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terjadi sebesar 23,7 persen dengan jumlah 24,60 juta kunjungan wisatawan domestik dan 72453 kunjungan wisatawan mancanegara selama periode Januari-Oktober. Dengan jangka periode yang sama, jumlah itu naik jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan di tahun 2023 yang hanya berjumlah 16,7 juta kunjungan domestik dan 64107 juta kunjungan mancanegara.¹⁹ Walhasil, akomodasi hotel dan makan-minum berhasil menyumbang pertumbuhan kapital Jogja sebesar 12,58%.²⁰

Secara bersamaan, pertumbuhan kapital di sektor industri wisata yang terus meningkat selama beberapa tahun itu telah berkontribusi pada peningkatan jumlah krisis dan ketidakadilan sosial ekologis di Jogja, seperti peningkatan alih fungsi lahan yang tiap tahunnya mencapai 200 hektar.²¹ Salah satu contoh alih fungsi lahan itu terjadi di Temon, Kulon Progo di mana pemerintah mengubah lahan pertanian menjadi Bandara baru pada 2016. Pada 2024, pertumbuhan kapital sektor industri wisata Jogja terus mensyaratkan bermacam krisis sosial ekologis yang melahirkan ketidakadilan sosial ekologis di Kota Jogja, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Pusparagam krisis sosial ekologis itu dapat dijelaskan pada bagian selanjutnya.

-
19. Badan Pusat Statistik DIY, 2024, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Asal (Perjalanan), 2024, dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=-/jumlah-kunjungan-wisata-wan-nusantara-menurut-asal---perjalanan-.html>, diakses pada 5 Januari 2025.
 20. Badan Pusat Statistik DIY, 2024, Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I, dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/press-release/2024/05/06/1596/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-i-2024.html>, diakses pada 5 Januari 2024.
 21. Fernan Rahadi, 2023, Lahan Pertanian DIY Turun 150-200 Hektar Pertahun, dalam <https://rejogja.republika.co.id/berita/rzqbal291/lahan-pertanian-di-diy-turun-150200-hektare-per-tahun>, diakses pada 05 Januari 2025.

Ledakan Sampah Industri Wisata Jogja

Peningkatan pertumbuhan kapital di sektor penyediaan makan minum telah menghasilkan sampah dalam jumlah besar di Jogja. Aris Prasena, Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY menyebut tiap pengunjung wisata menimbulkan sampah sebesar 0,4-0,8 kilogram,²² di mana akomodasi hotel menghasilkan sampah sebesar 100 ton/hari di Jogja.²³ Besarnya jumlah sampah tersebut diperparah dengan tidak bertanggung-jawabnya penyedia akomodasi terhadap sampah yang mereka hasilkan. Ketidak bertanggungjawan itu secara teknis disebut Agus

-
22. Agung Dwi Prakoso, TPST Piyungan Kembali Dibuka, Namun Hanya untuk Menampung Sampah Kota Jogja Bulan Ini, dalam <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655433232/t-pst-piyungan-kembali-dibuka-namun-hanya-untuk-menampung-sampah-kota-jogja-bulan-ini>, diakses 5 Januari 2024.
 23. Triyo Handoko, Duh! Sumbangan Sampah dari Hotel dan Restoran Jogja Bisa Capai 100 Ton per Hari, dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/07/510/1144434/duh-sumbangan-sampah-dari-hotel-dan-restoran-jogja-bisa-capai-100-ton-per-hari>, diakses 5 Januari 2025.

Priono, PLT Kadispar DIY, “Karena para pemilik hotel tidak mau mengelola sampahnya secara mandiri”. Menurutnya, dari ribuan hotel yang beroperasi di Jogja “Hanya satu hotel yang mampu mengolah sampah secara mandiri. Sisanya, sampah dibuang dengan sistem angkut-buang”.²⁴

Imbasnya, sewaktu TPST Piyungan yang selama 28 tahun menampung sampah-sampah dari Jogja ditutup oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jogja pada 1 Mei 2024, terjadilah ledakan sampah di Jogja. Tumpukan sampah terjadi di depot-depot dan pinggiran jalan Jogja. Bau busuk dan lingkungan yang kotor menjadi masalah yang warga Jogja rasakan. Kondisi itu membuat warga Jogja marah. Mereka terganggu karena sampah-sampah menyebabkan lingkungan kotor dan ancaman kesehatan. Beragam aksi protes dilancarkan oleh warga Jogja dan mendesak Pemprov Jogja untuk segera mengatasi masalah sampah.

Protes warga yang terus-menerus karena tumpukan sampah semakin tidak terkendali di sudut-sudut Jogja mendorong Pemprov Jogja untuk melakukan solusi praktis dengan cara membuka kembali TPST Piyungan pada Juli 2024. Pembukaan ini ditegaskan oleh Beny Suharsono, Sekretaris Daerah DIY, “Karena terjadi penumpukan sampah di sejumlah titik, salah satunya di dekat kompleks Kantor Gubernur DIY.”²⁵ Setelahnya, protes berhenti, tumpukan sampah yang bau sudah pergi; diantar ke pembuangan akhir di TPST Piyun-

24. Dinny Mutiah, TPA Piyungan Ditutup, Baru 1 dari 1.900an Hotel di Jogja yang Mampu Kelola Sampah Mandiri, dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5671166/tpa-piyungan-ditutup-baru-1-dari-1900an-hotel-di-jogja-yang-mampu-kelola-sampah-mandiri?page=3>, diakses 5 Januari 2025.

25. Haris Firdaus, Regina Rukmorini, dan Mohamad Final Daeng, 2024, Darurat Sampah di Yogyakarta, Kenapa TPA Piyungan Sempat Dibuka Kembali?, dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/-2024/06/07/darurat-sampah-di-yogyakarta-kenapa-tpa-piyungan-empat-dibuka-kembali>, diakses pada 5 Januari 2025.

gan dan aktivitas warga Jogja berjalan normal lagi, menyusul aktivitas akomodasi wisata dan makan minum yang terus menanggung untung.

Selang beberapa waktu, Pemprov Jogja merasa perlu untuk membatasi distribusi sampah ke TPST Piyungan. Tindakan ini dilakukan Pemprov Jogja berdasarkan kebutuhan mendesak tersedianya tempat pembuangan sampah dari Kota Jogja sebagai pusat industri wisata. Akhirnya DLH mengeluarkan kebijakan yang mengkhususkan TPST Piyungan hanya diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah dari Kota Jogja. Pengkhususan itu dilakukan DLH agar kejadian tumpukan sampah di Kota Jogja tidak terulang lagi apalagi Kota Jogja akan menghadapi banyaknya kunjungan wisatawan selama akhir tahun 2024. Perkiraan DLH memang tepat karena selama Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 industri wisata Jogja telah menghasilkan sampah sebesar 3.400 ton.²⁶ Semua sampah-sampah itu tidak menumpuk lagi di Kota Jogja karena TPST Piyungan telah dibuka kembali dan dikhususkan sebagai muara sampah industri wisata Jogja yang terpusat di Kota Madya.

Pada titik ini, sampah yang dihasilkan oleh industri wisata Jogja adalah bentuk krisis sosial ekologis yang melahirkan ketidakadilan sosial ekologis berupa pencemaran udara yang menguap dari bau busuk tumpukan sampah dan lingkungan yang kotor dan tercemar. Sementara pemilik akomodasi wisata dan tempat makan minum Jogja terus meraup keuntungan dari bisnis mereka. Ledakan sampah di Jogja memuat rasionalisasi bahwa sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat.²⁷ Sampah-sampah itu dihasilkan dari bermacam aktivitas yang ber-sumber dari kegiatan/aktivitas rumah tangga, kegiatan komersil,

26. Ahmad Mustaqim, 2024, Volume Sampah Libur Tahun Baru di Yogyakarta Mencapai Tiga Ribu Ton, dalam <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzoPL-volume-sampah-libur-tahun-baru-di-yogyakar-ta-mencapai-tiga-ribu-ton>, diakses pada 5 Januari 2025.

27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

industri dan rumah sakit, dan aktivitas pembersihan jalan dan taman.²⁸

Menurut jenisnya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengkategorikan sampah pariwisata sebagai bagian dari sampah rumah tangga.²⁹ Di Jogja, sampah dari sisa makanan mendominasi dengan total produksi sebesar 53,51 persen dari total keseluruhan.³⁰ Persentase itu belum ditambah dengan peningkatan kunjungan wisatawan pada hari-hari libur, seperti libur akhir tahun 2024 yang menghasilkan sampah sebesar 3400 ton.³¹ Jumlah itu merupakan sisa dari kegiatan wisata yang dihasilkan oleh aktivitas komersil industri wisata Jogja. Artinya, makan dan minum adalah syarat berlangsungnya industri wisata Jogja. Tanpa makan-minum, industri wisata Jogja tidak akan menghasilkan sampah berupa sisa makan-minum dari aktivitas wisata. Semakin banyak sisa aktivitas industri wisata dalam bentuk sampah yang dihasilkan, seperti makan-minum, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha/pemilik modal.

Dengan demikian, sampah adalah krisis sosial ekologis yang lahir bersamaan dengan atau sebagai syarat perkembangan industri wisata Jogja. Semakin banyak keuntungan yang didapat oleh pemodal industri wisata, maka semakin banyak sisa makan-minum industri wisata yang tidak diolah dengan baik. Keengganan akomodasi wisata hotel dan tempat makan minum mengolah sampah menyiratkan satu fakta bahwa para pemodal enggan mengeluarkan ongkos lebih karena dapat mengurangi jumlah keuntungan yang akan mereka

28. Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2016. *Pengelolaan Sampah Terpadu Edisi Pertama*, Bandung: Penerbit ITB.

29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

30. Muhamad Syahrial, 2024, Sisa Makanan Jadi Sampah Terbanyak di Yogyakarta, dalam <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/23/074455278/sisa-makanan-jadi-sampah-terbanyak-di-yogyakarta?page=all>, diakses pada 6 Januari 2025.

31. Ahmad Mustaqim, Volume Sampah Libur Tahun Baru di Yogyakarta Mencapai Tiga Ribu Ton, dalam <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzoPL-volume-sampah-libur-tahun-baru-di-yogyakarta-mencapai-tiga-ribu-ton>, diakses pada 6 Januari 2025.

dapat. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah enggan membebankan kewajiban pengelolaan sisa aktivitas industri wisata kepada para pemilik industri wisata itu. Pada gilirannya, lahirlah ketidakadilan sosial ekologis di Kota Jogja, yaitu penumpukan timbulan sampah di depo dan jalanan Kota Jogja yang menyebabkan bau busuk di udara dan lingkungan yang tercemar sehingga mengancam kesehatan warga Kota Jogja.

Berlanjutnya Ketidakadilan Sosial-Ekologis di Sitimulyo

Sementara waktu, pembukaan kembali TPST Piyungan membuat sampah sudah tidak menggunung dan mengotori lingkungan di Kota Jogja. Berbeda, pembukaan kembali TPST Piyungan telah melanjutkan ketidakadilan sosial ekologis yang sudah terjadi di Sitimulyo selama 28 tahun. Gunung sampah setinggi 140 meter akan terus menjulang. Bau menyengat dari gunung sampah itu akan terus menjadi mata panah pada tiap udara yang Warga Sitimulyo hirup. Pencemaran lindi akan terus menggagalkan panen warga yang mayoritas bekerja sebagai petani karena tanah dan sawah mereka terus tercemar.³² Kandungan klorin yang tinggi di sumur-sumur warga karena tercemar air lindi akan terus menghadirkan ispa, gatal, dan stroke.³³

Bagi kami, pembukaan kembali TPST Piyungan menggambarkan kebebalan Pemprov Jogja terhadap ketidakadilan sosial ekologis di Sitimulyo. Protes yang warga lakukan sejak 2016 tidak membuat

32. Walhi Jogja, 2022, Kisah Kelam dari Gunung Sampah Piyungan, dalam <https://walhijogja.or.id/kisah-kelam-dari-gunung-sampah-piyungan/>, diakses pada 6 Januari 2025

33. Walhi Jogja, 2024, Pencemaran Air Lindi di Piyungan: Bukti World Water Forum Belum Jadi Solusi Pengelolaan Air, dalam <https://walhijogja.or.id/project/pencemaran-air-lindi-di-piyungan-bukti-world-water-forum-belum-jadi-solusi-pengelolaan-air/>

pemerintah daerah merasa perlu untuk memulihkan masalah sosial dan ekologis di Sitimulyo.³⁴ Alih-alih menutup TPST Piyungan sejak 2012 karena sudah melebihi kapasitas, Pemprov Jogja justru men-
teknifikasi persoalan dengan alasan kekurangan dana untuk memak-
simalkan sistem sanitary landfill di TPST Piyungan.

Di TPST Piyungan, sistem pengelolaan air lindi terdiri dari beber-
apa bagian, yaitu: Pertama, bar Screen yang digunakan di IPL untuk
menyaring limbah padat. Bagian ini memiliki saluran inlet (pipa atau
titik dimana air lindi dari landfill masuk ke pengolahan sampah).
Kedua, bak koagulasi yang berfungsi untuk mengendapkan par-
tikel-partikel di dalam air lindi. Pengendapan itu bertujuan untuk
menghilangkan/mengurangi partikel-partikel padatan terlarut
dalam air lindi, sehingga air lindi menjadi jernih dan mudah diolah
atau diawetkan dalam proses pengolahan selanjutnya. Ketiga, bak
ekualisasi yang berfungsi untuk menjaga agar beban limbah tetap
berada pada standart besaran limbah yang dapat diolah. Keempat,
bak sedimentasi yang digunakan untuk membiarkan padatan tersus-
pensi dari cairan. Proses ini dilakukan dengan cara mengendapkan
partikel di dasar bak, yang selanjutnya dibuang sebagai lumpur.
Proses sedimentasi bertujuan untuk mengurangi jumlah padatan
dalam air lindi yang dapat menimbulkan masalah di bagian hilir jika
dibuang melalui proses sedimentasi. Kelima, bak aerasi yang ber-
fungsi untuk memroses pencampuran antara air lindi dengan udara
agar jumlah oksigen terlarut di dalam air lindi meningkat. Aerasi ber-
tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan biologis
dengan menyediakan oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan
bakteri aerob. Keenam, bak maturasi yang merupakan unit operasi
dalam pengolahan lindi. Bak maturasi bekerja dengan membiarkan
lindi yang telah diolah tetap berada di bak maturasi selama jangka

34. Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 2018, Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Ikplhd) Kabupaten Bantul Tahun 2018, hlm. 150, dalam <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka-/images/docs/BUKU%20IKPLHD%-202018%20KAB.%20BANTUL.pdf>, diakses 6 Januari 2025.

waktu tertentu agar sisa padatan tersuspensi (TSS) dapat mengendap. Ketujuh, bak klorinasi, yaitu bak yang digunakan untuk penambahan desinfektan. Proses klorinasi air lindi bertujuan untuk menghilangkan patogen dan zat organik yang masih tersisa dalam air lindi setelah proses pengolahan.

Namun, kami menemukan beberapa masalah yang terjadi di dalam praktik pengelolaan lindi TPST Piyungan, antara lain: Pertama, terdapat pipa di bagian Bar Screen yang langsung menuju pembuangan tanpa melalui bak-bak selanjutnya. Warga menyebut pipa itu dengan sebutan “pipa siluman” karena pipa tersebut telah menimbulkan luberan air dan mengalirkan air secara langsung ke parit dan pipa irigasi menuju Sungai Opak. Seharusnya, Menurut Fauzan, Warga Banyak, “pipa itu mengalirkan air lindi ke kolam untuk diproses terlebih dahulu. Kedua, pengelolaan lindi yang tidak optimal. Ketidak optimalan pengelolaan lindi itu kami lihat dengan keberadaan pipa inlet yang terus mengalirkan air lindi dari landfill. Hal itu telah berimbas pada luberan air lindi di bar screen dan terjadi bocoran-bocoran lindi yang tidak melalui proses pengelolaan.

Ketiga, proses aerasi yang tidak dilakukan secara rutin. Proses aerasi merupakan proses pelarutan oksigen ke dalam air lindi yang berfungsi untuk meningkatkan Oksigen dan bertujuan untuk mengembangbiakkan bakteri Aerob. Bakteri Aerob berfungsi untuk menurunkan kadar Biological Oxygenic Demand (BOD) dan Chemical Oxygenic Demand (COD) sebagai paramater yang menunjukkan tingkat pencemaran organik dalam air. Proses aerasi akan menurunkan nilai BOD dan COD yang signifikan. Selain itu Bakteri Aerob juga berfungsi mengurai bau di dalam air. Pengelolaan lindi TPST Piyungan yang tidak melalui proses aerasi secara rutin telah menimbulkan tingginya jumlah BOD dan COD yang terlarut ke Sungai Opak. Selain itu kurangnya proses oksigen yang terlarut di dalam air lindi di TPST Piyungan juga telah menimbulkan beberapa masalah seperti bau menyengat yang tidak terkendali, terjadinya endapan yang tersuspensi sehingga terjadi sedimentasi di hilir, dan

terjadi proses Anaerob yang dapat menghasilkan gas metan sehingga terdapat potensi kebakaran dan kandungan gas yang beracun akibat proses anaerob.

Uji laboratorium yang kami lakukan menemukan bahwa titik outlet (pipa yang mengeluarkan air lindi) yang berada di Sungai Opak telah tercemar zat kimia yang tinggi, seperti BOD, COD, Nitrit,

Tabel 1: Hasil Uji Laboratorium Pencemaran Lindi di Sungai Opak

Parameter	Satuan	Sungai Opak			Kelas Air Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021			
		Hulu	Outlet	Hilir	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
Fisika								
Temperatur	mg/L	28.3	28.9	28.5	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 3
TDS	mg/L	268	352	296	1,000	1,000	1,000	2,000
TSS	mg/L	8.9	10.9	9.3	40	50	100	400
Kimia								
pH*in Lab		7.53	7.85	7.74				
DO	mg/L	6.04	5.84	6.64	6	4	3	1
BOD	mg/L	3.63	6.45	5.65	2	3	6	12
COD	mg/L	27.7	53.7	38.7	10	25	40	80
Klorida (Cl)	mg/L	19.9	36.7	23.8	300	300	300	600
Nitrat (NO3)	mg/L	1.15	0.45	0.57	10	10	20	20
Nitrit (NO2)	mg/L	0.09	0.94	0.37	0,06	0,06	0,06	
Amonia (NH3)	mg/L	0.15	4.45	1.46	0,1	0,2	0,5	
Sulfat (SO42)	mg/L	21.8	24.4	23.1	300	300	300	400
Total Fosfat	mg/L	0.46	0.62	0.49	0,2	0,2	1,0	
Besi (Fe) Terlarut	mg/L	0.06	0.51	0.27	0,3			
Timbal (Pb) Terlarut	mg/L	< 0.03	< 0.03	<0.03	0,03	0,03	0,03	0,5
Kadmium (Cd) Terlarut	mg/L	< 0.01	< 0.01	<0.01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mikrobiologi								
Total Coliform	MPN/100mL	≥ 2400	210	≥ 2400	1,000	5,000	10,000	10,000
Fecal Coliform	MPN/100mL	≥ 2400	210	1100	1,000	5,000	10,000	10,000

Sumber: Dokumen Uji Laboratorium Walhi Jogja, 2024.

Amonia, Total Sulfat dan Besi terlarut. Beberapa parameter menunjukkan bahwa air sungai masuk di antara kelas air 2 dan 3 sebagaimana tergambar pada Tabel 1 di bawah ini.

Pencemaran lain juga terjadi di sumur-sumur warga Sitimulyo sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2. Hasil uji laboratorium di dua titik sumur, yaitu sumur dekat Sungai Opak yang menjadi sumur kolektif warga dan sumur dekat landfill, menunjukkan bahwa terdapat kandungan Besi (Fe) terlarut di atas kadar maksimal yang ditetapkan oleh Permenkes Nomor 2 tahun 2023. Tingginya kandun-

Tabel 2: Hasil Uji Laboratorium Pencemaran Air Sumur Warga.

Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kadar Maksimal)	Air Sumur 1 (444/LH/24)	Air Sumur 2 (445/LH/24)	Metode Uji
Fisika					
Temperatur*	°C	Suhu udara ± 3	33.1	29	SNI 06-6989.23-2005
Kekeruhan*	NTU	<3	0.16	0.76	SNI 06-6989.25: 2005
TDS	mg/L	<300	469	504	SNI 6989.27: 2019
Kimia					
pH*	-	6.5 - 8.5	7.29	6.55	SNI 6989.11: 2019
Nitrat (NO ³)*	mg/L	20	5.06	3.69	IK-P 7.4.2.9 Spektrofotometri
Nitrit (NO ²)*	mg/L	3	0.03	0.02	SNI 06-6989.9-2004
Besi (Fe) Terlarut	mg/L	0.2	0.64	0.49	SNI 6989.4:2009
Mikrobiologi					
Total Coliform	mg/L	0	4	150	Standard Methods 23rd, 2017
Fecal Coliform	mg/L		4	150	Standard Methods 23rd, 2017

Sumber: Dokumen Uji Laboratorium Walhi Jogja, 2024

gan Besi yang terlarut di air sumur warga dan Sungai Opak menjadikan air tersebut tidak aman/layak konsumsi karena dapat mempengaruhi kesehatan dalam waktu yang panjang.

Pada sampel lain, hasil uji laboratorium air dari IPL TPA Piyungan menunjukkan bahwa baku mutu kandungan TSS, BOD, COD, dan Besi (Fe) yang terlarut di dalam air lindi di IPL TPA Piyungan berada di atas baku mutu yang telah ditetapkan oleh Permen LHK no 59 tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Tabel 3: Hasil Uji Laboratorium IPL TPA Piyungan

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Air Lindi 1 (442/LH/24)	Air Lindi 2 (443/LH/24)	Metode Uji
Parameter Fisika					
Temperatur	°C		33,2 °C	32,1 °C	SNI 06-6989.23-20 05
TSS*	mg/L	100	58,7 mg/L	369 mg/L	SNI 6989.3: 2019
Parameter Kimia					
pH	-		8,18	8,33	SNI 6989.11: 2019
BOD*	mg/L	150	181 mg/L	212 mg/L	SNI 6989.72:2009
COD*	mg/L	300	3770 mg/L	3837 mg/L	SNI 6989.2: 2019
Besi (Fe) Terlarut	mg/L		6,79 mg/L	8,06 mg/L	SNI 6989.4:2009
Kadmium (Cd) Terlarut	mg/L	0,1	< 0,01 mg/L	< 0,01 mg/L	SNI 6989.16:2009
Timbal (Pb) Terlarut	mg/L		< 0,03 mg/L	< 0,03 mg/L	SNI 6989.8:2009

Sumber: Dokumen Uji Laboratorium Walhi Jogja, 2024

Besarnya volume sampah dari industri wisata Jogja dan buruknya tata kelola sampah di TPST Piyungan akan melanjutkan ketidakadilan sosial dan ekologis di Sitimulyo. Bau menyengat di udara dari tumpukan sampah di TPST Piyungan akan semakin memperburuk

kondisi kesehatan warga. Rusaknya padi warga akan terus melanjutkan hilangnya pendapatan ekonomi warga. Gunung sampah yang terus meninggi akan menimbulkan ledakan dahsyat karena gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme kekurangan oksigen, sebagaimana telah terjadi di Leuwihgajah, Cimahi, Jawa Barat pada 2005 dan kebakaran di TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah pada 2023.³⁵

Pembukaan kembali TPST Piyungan tidak lain merupakan bentuk keberpihakan Pemprov Jogja terhadap pertumbuhan kapital di sektor industri wisata Jogja dan mengabaikan masalah kesehatan dan kegagalan panen yang terus dialami oleh warga Sitimulyo. Ini sekaligus menunjukkan betapa buruknya industri pariwisata Jogja yang dari depan tampak (dan harus) bersih, tapi menyimpan luka di bagian belakang (TPST Piyungan),³⁶ dan terus melanjutkan luka ketidakadilan sosial ekologis di Sitimulyo.

35. Khumar Mahendra, 2023, Ledakan TPA Leuwigajah, Insiden Paling Parah yang Pernah Terjadi di Indonesia, dalam <https://www.tempo.co/lingkungan/ledakan-tpa-leuwigajah-insiden-paling-parah-yang-pernah-terjadi-di-indonesi-a-141803>, diakses pada 6 Januari 2025.

36. Lihat, Nafisaul Khoidah, 2024, "Luka dibalik Romantisme Yogyakarta: Krisis Reproduksi Sosial Sampah dan Pencemaran Air," dalam Sandang dkk., 2024, Ngelep Ngrumat Niteni: Ekologi Poitik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, hlm. 92-121.

Kebebalan Pemerintah dan Upaya Mereplikasi Derita di Tempat Lain

Sebelum pembukaan kembali TPST Piyungan, Pemprov Jogja lebih dulu telah mengeluarkan resolusi desentralisasi pengelolaan sampah yang dibebankan kepada Pemkab/Pemkot se-Jogja. Kebijakan desentralisasi sampah itu mewajibkan Pemkab/Pemkot se-Jogja untuk membuat Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di wilayahnya masing-masing karena TPST Piyungan sudah tidak mampu menampung lagi. Hingga TPST Piyungan dibuka lagi, TPSS terus beroperasi di berbagai wilayah di Jogja.

Pada perjalanannya, kebijakan desentralisasi itu mendapat protes dan penolakan dari warga sekitar TPSS. Hal ini kami ketahui dari banyaknya aduan warga sekitar TPSS kepada Walhi Jogja, seperti di Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul. Di Srimulyo, Pemkab Bantul berencana untuk membangun TPSS di tanah berstatus Sultan Ground/SG seluas 3000 m². Pembangunan TPSS itu direncanakan bertempat di salah satu dari tiga titik, yaitu TPSS Kaligatuk, TPSS Puncak Bucu, dan TPSS Tumpang. Ketiganya merupakan wilayah yang berbatasan dengan Sitimulyo, yaitu Dusun Banyak I, II, dan III, dan Pagergunung I dan II.

Berdasarkan kesadaran betapa bahanya tumpukan sampah dan akibat yang ditimbulkan, seperti telah terjadi di Sitimulyo, Warga Sri-

mulyo menolak rencana Pemkab Bantul untuk membangun TPSS di desa mereka. Selain itu, penolakan juga datang dari Warga Banyakan I, II, dan III, dan Pagergunung I dan II, Sitimulyo karena dekatnya TPSS dengan dusun-dusun tempat tinggal mereka sehingga akan memperluas pencemaran lingkungan dan semakin merusak sawah-sawah warga. Seluruh penolakan itu dilayangkan warga sewaktu Pemkab Bantul dan Perangkat Desa Srimulyo melakukan sosialisasi rencana pembangunan TPSS di Srimulyo.

Di tempat lain, Pemkab Bantul juga membangun TPSS di Pantai Pandansari, Gadingsari. Investigasi kami bersama Forum Peduli Gadingsari (FPG) menemukan bahwa pembangunan TPSS di Pantai Pandansari tidak melalui proses yang terbuka dan tanpa dokumen lingkungan (amdal). TPSS Pandansari dibangun dengan melubangi lahan di Pantai Pandansari yang DLH Bantul sebut sebagai geomembran. Di lokasi, kami melihat lubang geomembran itu sudah berisi sampah-sampah yang ditimbun dengan pasir pantai. Selain itu kami juga melihat lubang yang berbeda dan berisi air hujan. Bagi kami dan FPG, pembentukan TPSS di Pantai Pandansari yang tidak melalui proses dokumen perencanaan atau amdal merupakan bentuk kejahatan lingkungan. DLH mengabaikan ancaman gelombang pasang yang dapat menghanyutkan tumpukan sampah di TPSS Pantai Pandansari mengingat jaraknya yang dekat sekitar 100 meter dari bibir pantai. Sampah yang hanyut akan mencemari laut dan lingkungan warga.

Ledakan sampah dari industri wisata Jogja juga menggerakkan pemodal untuk membuat TPSS liar, seperti di Sedayu, Bantul. Pembuatan TPSS liar itu berlokasi di Sempadan Sungai Progo, tepatnya di Demangan RT. 34, Argodadi Sedayu. TPS liar itu dibangun untuk menampung sampah dari wilayah Kota Jogja. DLH Bantul menyebut bahwa ada 8 truk setiap hari yang membuang sampah di TPSS liar itu. Hasil temuan DLH Bantul menunjukkan bahwa sampah tersebut merupakan sampah yang diangkut oleh truk dan di bawa ke tempat tersebut lalu diuruk menggunakan tanah. Desakan warga yang terus dilancarkan mendorong DLH Bantul untuk menutup TPSS liar terse-

but. Namun, setelah penutupan sampah-sampah masih menumpuk di TPSS liar itu. Hal itu dapat menimbulkan masalah pencemaran di Sungai Progo dan air warga. Bila terus dibiarkan, warga Agrodadi, Sedayu akan mengalami derita yang sama dengan warga Sitimulyo.

Perihal TPSS liar itu, investigasi kami menemukan dua hal, yaitu; Pertama, pembukaan TPSS liar merupakan bentuk kelalaian DLH Bantul dalam menjalankan tugasnya. Kedua, setelah penutupan TPSS liar itu, DLH tidak memberikan sanksi kepada pihak yang membuat bisnis TPSS liar itu. Ketiga, setelah penutupan, DLH Bantul juga tidak melakukan pemulihan lingkungan di bekas lokasi TPSS liar sehingga berpotensi mencemari Sungai Progo dan sumber air warga karena letaknya yang dekat dengan sumber resapan air warga.

Selain TPSS liar di sempadan Sungai Progo, pemodal juga menjadikan momen ledakan sampah dari industri wisata Jogja untuk membuka bisnis depo sampah illegal sebagaimana terjadi di Sinduharjo, Ngaglik. Serangkaian protes dilancarkan warga kepada DLH Sleman. Namun protes dan kecaman warga itu hanya membuahkan hasil rekomendasi dari DLH Sleman untuk pemilik depo. Rekomendasi itu berisi kewajiban pemilik depo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari untuk melakukan beberapa hal, antara lain: Pertama, meninggikan bangunan yang menjadi tempat transit sampah dan membuat ruangannya tertutup agar bau tidak keluar. Kedua, pengusaha harus menyemprotkan cairan yang dapat menghilangkan bau, saat operasi pembongkaran sampah di depo tempat transit tersebut. Ketiga, pengusaha harus menyalurkan limbah cair lindi ke saluran IPAL agar tidak mencemari tanah dan air tanah yang ada di sekitar warga. Namun, rekomendasi itu tidak memberikan efek apapun terhadap kondisi Warga Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Bau busuk tetap menguar dan air lindi tetap menetes kemudian merembes ke tanah-tanah warga. pembangunan depo yang sedari awal tidak memiliki amdal itu menunjukkan kebebalan Pemkab Sleman dalam menjaga warganya dari bermacam ancaman kesehatan.

Pembentukan TPSS di Srimulyo dan Pandansari menegaskan kebebalan pemerintah terhadap dampak buruk pencemaran lindi dan

udara yang akan menimpa warga sekitar TPSS. Sedangkan kejadian di TPSS liar di Sempadan Sungai Progo, Sedayu dan Depo sampah di Sinduharjo, Ngaglik menjadi ilustrasi bagaimana keterlibatan negara dalam penciptaan ketidakadilan sosial dan ekologis di dua tempat itu. Pembentukan TPSS dan depo sampah baik yang dilakukan oleh DLH maupun pemodal menegaskan kebebalan pemerintah terhadap ancaman ketidakadilan sosial ekologis sebagaimana telah terjadi di Sitimulyo. Dengan demikian, kebebalan itu adalah upaya pemerintah dan pemodal mereplikasi/menggandakan penderitaan yang terjadi di Sitimulyo selama 28 tahun di tempat lain.

Alih Fungsi Lahan Pantai Sanglen untuk Pembangunan Resort Obelix Beach Club di Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul

Di Gunung Kidul, cetak biru industri wisata Jogja dalam Program KSPN DIY telah memberikan peningkatan investasi/modal sebesar Rp 551 miliar selama 2024.³⁷ Sebagaimana terjadi di tempat lain, peningkatan investasi di Gunung Kidul juga telah meningkatkan alih fungsi lahan di Gunungkidul yang pada 2023 telah mencapai 10.000 hektare,³⁸ salah satunya terjadi di Pantai Sanglen yang berlokasi di Kemadang, Tanjungsari.

Bertempat di Kawasan Karst Tanjungsari, Pantai Sanglen masuk sebagai wilayah Karst Tanjungsari yang menjadi bagian dari KBAK Gunungsewu. Di bawah Karst Tanjungsari itu mengalir sungai bawah tanah yang menjadi cadangan air bagi Warga Gunung Kidul. Aliran air sungai bawah tanah itu bersumber dari air yang dihasilkan oleh batuan karbonat yang mengandung porositas sekunder melalui

37. Muhammad Ilham Baktora, 2025, Investasi Gunungkidul Tumbuh Pesat, Sektor Pariwisata dan Perdagangan jadi Primadona, dalam <https://jogja.suara.com/read/2025/01/06/145235/-investasi-gunungkidul-tumbuh-pesat-sektor-pariwisata-dan-perdagangan-jadi-primadona>, diakses pada 7 Januari 2025.

38. Martino, 2023, Bupati Himbau Warga Tak Tergiur Jual Lahan ke Investor, dalam <https://gunungkidul.-sorot.co/berita-108189-bupati-himbau-warga-tak-tergiur-jual-lahan-ke-investor.html>, diakses pada 7 Januari 2025.

pelarutan dan diagenesis pada batuan karbonat itu sendiri sehingga Karst Gunungsewu memiliki potensi yang besar sebagai penghasil air tanah.³⁹ Karenanya, pemerintah menetapkan KBAK Gunungsewu sebagai kawasan lindung geologi dan penyimpan air bawah tanah sehingga pemanfaatan kawasannya pun tidak boleh dipergunakan untuk aktivitas yang merusak.⁴⁰

Akan tetapi, kawasan lindung geologi itu terancam rusak karena alih fungsi lahan seluas 6 hektar di Pantai Sanglen untuk pembangunan Resort Obelix Beach.⁴¹ Pembangunan Resort Obelix Beach merupakan manifestasi dari investasi/modal yang terus meroket di Jogja. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi/kapital yang dihitung dari pendapatan sektor wisata Resort Obelix Beach. Syaratnya, alih fungsi lahan kawasan Karst Tanjungsari dilakukan dengan cara menggusur warung-warung dan lahan pertanian Warga Gunung Kidul yang sejak lama mereka tempati.⁴² Menurut Panitiskismo, Kesultanan Jogja, alih fungsi lahan itu dilakukan karena pihak keraton sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Biru Bianti Indonesia. Pada titik ini, kami menyebut alih fungsi lahan Pantai Sanglen untuk pembangunan Resort Obelix Beach sebagai bentuk krisis sosial ekologis pendahulu. Dari sana, lahirlah ketidakadilan sosial ekologis, yaitu para petani dan pedagang kehilangan sumber pendapatan harian dari berdagang dan bertani karena warung dan lahan pertanian mereka telah hilang.

Kerjasama antara Keraton Jogja dengan PT Biru Bianti Indonesia menambah deretan upaya perusakan KBAK Gunungsewu untuk mendulang keuntungan. Sebelumnya, Raffi Ahmad bersama Arbi Leo juga

39. Kusumayudha, S., Zen, M., Notosiswoyo, S. et al. Fractal analysis of the Oyo River, cave systems, and topography of the Gunungsewu karst area, central Java, Indonesia. *Hydrogeology Journal* 8, 271–278 (2000). <https://doi.org/10.1007/s100400050014>

40. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 3045 K/40/MEM/2014 Dan Permen ESDM Nomor 17/2012

41. Hendro, Pantai Sanglen Ditutup Keraton, Begini Tanggapan Bupati Gunungkidul, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/5859526/pantai-sanglen-ditutup-keraton-begini-tanggapan-bupati-gunungkidul>. Diakses 07 Januari 2025.

42. Walhi Jogja, 2024, Sejarah Pemanfaatan Tanah dan Pengelolaan Pantai Sanglen, dalam <https://walhijogja.or.id/-project/sejarah-pemanfaatan-tanah-dan-pengelolaan-pantai-sanglen/>, diakses pada 7 Januari 2025

mengupayakan alih fungsi lahan Kawasan Karts Tanjungsari di kawasan Pantai Krakal untuk membangun Resort dan Beach Club Bekizart berkapasitas 300 villa dan tiga restoran. Namun, besarnya ancaman kerusakan Karst Tanjungsari di Pantai Krakal memaksa PT. Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) untuk menghentikan pembangunan resort di lahan seluas 10 hektar itu.⁴³ Kini, Setelah proyek itu berhenti, Karst Tanjungsari kembali terancam rusak.

Pembangunan Resort Obelix Beach memberi ancaman serius terhadap kelangsungan Karst Tanjungsari. Berdirinya bangunan Resort Obelix Beach di Pantai Sanglen akan memberi tekanan pada Karst Tanjungsari sehingga berpotensi mengulang kerusakan karst yang pernah terjadi di Bribin, di mana pendirian bangunan di atas Karst Bribin telah menyebabkan rusaknya karst sebagai penyimpan air.⁴⁴ Lebih lanjut, ekstraksi air bawah tanah untuk mencukupi kebutuhan air wisatawan akan mempercepat kerusakan Karst Tanjungsari, sehingga mengancam cadangan air masyarakat yang berimbas pada terjadinya kekeringan ekstrim di Gunung Kidul, termasuk di Tanjungsari.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, sepanjang tahun 2024 kekeringan telah berdampak pada 44.437 jiwa dari 15.648 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, Tanjungsari menjadi daerah terdampak paling parah kedua dengan 6.872 jiwa setelah Panggang dengan 17.903 jiwa.⁴⁵ Desa Kemadang, Tanjungsari adalah satu dari banyak daerah yang

43. Walhi Jogja, 2024, Investasi Raffi Ahmad Ancam Kawasan Karst Dan Perbesar Potensi Kekeringan di Gunung Kidul, <https://walhijogja.or.id/project/investasi-raffi-ahmad-ancam-kawasan-karst-dan-perbesar-potensi-kekeringan-di-gunung-kidul/>, diakses pada 10 Januari 2025.

44. Endarto, Raras; Gunawan, Totok; Haryono, Eko. Kajian Kerusakan Lingkungan Karst sebagai Dasar Pelestarian Sumberdaya Air (Kasus di DAS Bribin Hulu Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta). *Majalah Geografi Indonesia*, [S.l.], v. 29, n. 1, p. 51-59, sep. 2016. Diakses 6 Januari 2025. Doi:<https://doi.org/10.22146/mgi.13099>.

45. Markus Yuwono dan Sari Hardiyanto, 2024, "55.437 Jiwa di Gunungkidul Terdampak Kekeringan, Musim Kemarau sampai Kapan?", dalam <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/09/20/-095708178/55437-jiwa-di-gunungkidul-terdampak-kekeringan-musim-kemarau-sampai-kapan>, diakses pada 7 Januari 2025.

terdampak kekeringan parah selama bertahun-tahun selain Desa Ngestirejo, Banjarejo, Kemiri, dan Hargosari.⁴⁶ Ancaman kekeringan ekstrim akibat kerusakan Karst Tanjungsari menjadi bentuk ancaman krisis sosial ekologis selanjutnya yang melahirkan ketidakadilan sosial ekologis berupa hilangnya cadangan air dan semakin sulitnya masyarakat Gunung Kidul memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Pendapatan masyarakat Gunung Kidul akan hilang karena sawah-sawah mereka tidak dapat lagi mendapat aliran air. Di musim hujan, ancaman longsor dapat terjadi di Tanjungsari, sebagaimana pernah terjadi di tahun 2022.⁴⁷ Longsor adalah bentuk krisis sosial ekologis ketiga yang dapat muncul dari beroperasinya Resort Obelix Beach. Dampaknya, longsor akan melahirkan ketidakadilan sosial dan ekologis berwujud rusaknya rumah-rumah, sawah, kerugian dan kehilangan pendapatan ekonomi, dan bahkan kematian.

Situasi lebih parah, rusaknya Karst Tanjungsari akan memperparah perubahan iklim yang terus melanda Jogja karena Karst Tanjungsari tidak bisa lagi berfungsi untuk menyerap karbondioksida. Hujan setelah periode kemarau panjang akan menyebabkan banjir bandang karena fungsi tampung karst telah rusak. Peristiwa di Kalinongko pada 2019 dapat menjadi pembelajaran bagaimana perubahan iklim telah menciptakan Siklon Tropis Savannah yang pada gilirannya menyebabkan banjir setinggi 6 meter dengan luas 13.723 m² dan volume genangan 4.894 m³ di Karst window Kalinongko selama 10 hari. Banjir itu mengakibatkan lahan sawah seluas 10.586 m² dan kebun seluas 3.137 m² terendam,⁴⁸ sehingga masyarakat mengalami kegagalan panen.

46. Sely Novita Sari, Anggi Hermawan, Rizal Maulana, dan Oggi Heicqal Ardian, 2023, Penentuan Daerah Terdampak Kekeringan dan Potensi Air Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2023, *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA* e-ISSN: 2987- 0135 Volume 1, No. 12, Tahun 2024, hal. 3369-3370.

47. Anonim, 2022, Tebing Longsor di Kapanewon Tanjungsari, dalam <https://bpbd.gunungkidulkab.go.id/-/2022/10/-11/tebing-longsor-di-kapanewon-tanjungsari/>, diakses pada 7 Januari 2025.

48. Indra Agus Riyanto, Ahmad Cahyadi, Fajri Ramadhan, Muhammad Naufal, Margaretha Widyastuti, dan Tjahyo Nugroho Adji, Dampak Siklon Tropis Savannah pada Karst window Kalinongko, Karst Gunungsewu, Kabupaten Gunungkidul, Indonesia, *Jurnal Geografi* 17(2) (2020) 7-14, hlm. 14. I <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG>

Situasi serupa dapat terjadi di Tanjungsari, perubahan iklim karena rusaknya fungsi Karts Tanjungsari sebagai penyerap karbon dapat melahirkan krisis sosial ekologis lain berupa banjir bandang di Gunung Kidul. Kegagalan panen, kematian, dan kerusakan rumah dan lahan menjadi sederet ancaman ketidakadilan sosial ekologis yang bisa terjadi di Gunung Kidul secara keseluruhan.

Semua potensi krisis sosial ekologis di atas bermuara pada pembangunan Resort Obelix Beach sebagai manifestasi dari pertumbuhan ekonomi/kapital yang mensyaratkan alih fungsi lahan di Pantai Sanglen. Dengan demikian, alih fungsi lahan Pantai Sanglen adalah bentuk dari krisis sosial ekologis pendahulu yang melahirkan ketidakadilan sosial ekologis berupa hilangnya penghidupan warga dari berdagang dan bertani karena lapak dagang dan pertanian mereka telah rusak. Jika pembangunan itu dilanjutkan, krisis dan ketidakadilan sosial ekologis lainnya dapat terjadi di Gunung Kidul.

Ancaman Resort Jungwok Blue Ocean terhadap Akses Air Warga Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul

Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo adalah salah satu daerah rawan kekeringan di Gunung Kidul.⁴⁹ Walaupun Jepitu bertempat di bagian KBAK Gunung Kidul, keberadaan air yang berada di bawah tanah membuat warga kesulitan untuk mengakses air itu. Sulitnya akses air yang berkepanjangan telah mendorong Warga Jepitu-yang tergabung dalam Kombi, untuk mencari solusi bersama.

Hasilnya, pada tahun 2019, Kombi berhasil menemukan sumber mata air di Gua Pule Jajar, Jepitu, Girisubo. Dengan bantuan berbagai pihak, Kombi berhasil mendistribusikan air dari Gua Pule Jajar ke Warga Jepitu melalui truk tangki dari hasil hibah Badan Wakaf Al-Quran (BWA).⁵⁰ Ongkosnya, warga secara swadaya melakukan

49. Sely Novita Sari, Anggi Hermawan, Rizal Maulana, dan Oggi Heicqal Ardian, 2023, Penentuan Daerah Terdampak Kekeringan dan Potensi Air Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2023, JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA e-ISSN: 2987- 0135 Volume 1, No. 12, Tahun 2024, hal. 3369-3370.

50. Admin, 2019, Mimpi 5000 Warga Jepitu Bisa Menikmati Air Bersih, dalam https://www.wakaf.wakafquran.org/mimpi_5000_an_warga_desa_jepitu_bisa_menikmati_air_bersih/, diakses 08 Januari 2025.

patungan untuk membayar truk tangki sebesar 100.000/tangki. Ongkos itu mereka pergunakan untuk membayar sopir, membeli bahan bakar, dan perawatan truk tangki. Menurutnya, biaya ini lebih murah ketimbang biaya air PDAM Tirta Handayani maupun perusahaan swasta. Mahalnya air PDAM dan perusahaan swasta itu karena pemahaman politis bahwa air sebagai komoditas dan masyarakat sebagai konsumen/pembeli. Praktiknya, siapapun yang menginginkan air harus membeli dengan harga yang tidak murah sehingga air hanya bisa diakses oleh masyarakat yang mampu membayar mahal.⁵¹

Saat ini, distribusi air ke rumah-rumah warga mereka lakukan dengan menggunakan lima truk tangki, dengan rincian empat truk milik warga berkapasitas 5.000 liter/tangki dan satu truk hasil hibah dari BWA berkapasitas 6.000 liter/tangki, sambil terus mencari cara sistem distribusi yang lebih efektif. Pada September-Oktober 2024, distribusi air Kombi menunjukkan kemajuan dengan berhasil mengalirkan air ke lahan pertanian warga.⁵² Warga pun bersyukur karena kebutuhan air untuk konsumsi dan pertanian mereka telah tercukupi meskipun musim kemarau datang. Ke depannya, Kombi ingin memperluas distribusi air itu ke desa-desa lain di Girisubo agar sama-sama mendapat manfaat dari air Gua Pule Jajar.

Belum lama warga menikmati air bersih, ancaman besar menjulang di depan mata. Tak jauh dari Gua Pule Jajar, sekitar 5 km ke arah selatan, berdiri Resort Jungwok Blue Ocean (JBO) sejak 2023. Walaupun sudah beroperasi, warga mencurigai JBO berdiri tanpa dokumen lingkungan. Menurut Satu (nama samaran), kecurigaan itu warga sandarkan pada keengganan pihak JBO untuk menunjukkan dokumen lingkungan kepada warga. Kecurigaan itu menguat ketika seseorang, yang menyebut dirinya sebagai utusan Bupati Gunung Kidul-, mendatangi warga untuk menanyakan boleh/tidaknya JBO

51. Lihat, Muhamad Nasihudin, 2024, "Dialektika Siklus-Siklus Hidrososial yang Mahal dan yang Murah: PDAM Tirta Sembada dan PAM Dusun Tirta Wening," dalam Sandang dkk., 2024, *Ngelep Ngrumat Niteni: Ekologi Poitik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah*, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, hlm. 5-32.

52. Wawancara dengan Sugiyarto, Ketua Kombi, Juni 2024.

untuk ikut mengakses air dari Gua Pule Jajar. Warga pun secara tegas menolak permintaan utusan bupati itu.

Bagi warga, permintaan itu mempertebal keyakinan warga bahwa JBO tidak memiliki perencanaan lingkungan yang memadai sehingga berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk bisnis wisatanya. Di Gunung Kidul, pembangunan resort tanpa amdal juga pernah terjadi pada pembangunan Heha Ocean View di Girikarto, Panggang yang memanfaatkan lahan sempadan pantai seluas 20.758 meter persegi dari total 35.952 meter persegi.⁵³ Lebih parah lagi, pemilik Heha Ocean View dengan gampangnya menyusulkan dokumen amdal ke pemerintah daerah setelah semua bangunan telah berdiri dan wisata telah beroperasi. Pembangunan resort tanpa amdal merupakan manifestasi dari model pembangunan bercorak kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan tanpa amdal juga menjadi gambaran rendahnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi atas air (HAAR) warga.⁵⁴ Sama halnya, alih-alih menghentikan bisnisnya karena tidak memiliki amdal di tempat pertama, JBO justru berniat memperluas kawasan wisatanya dengan membangun infrastruktur pendukung, seperti penginapan dan tempat hiburan di lahan dekat sumber air warga. Rencana perluasan JBO berasal dari pengakuan Dua (nama samaran) di mana tanahnya telah ditawarkan oleh JBO senilai tujuh miliar rupiah.⁵⁵

Semakin luas bisnis wisata JBO, semakin banyak pula kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Cara paling murah adalah dengan mengambil alih sumber air di Pule Jajar atau mengek-

53. Admin, 2021, Nekat, Separuh Lebih Dari 35.952 Meter² Lahan Heha Ocean View Dibangun di Sempadan Pantai Tanpa AMDAL, dalam <https://kabarhandayani.com/nekat-separuh-lebih-dari-35-952-meter-C2%B2-lahan-heha-ocean-view-dibangun-di-sempadan-pantai-tanpa-amdal/>, diakses pada 8 Januari 2025.

54. Lihat, Yesaya Sandang dan Nandra Eko Nugroho, 2024, "Melawan Ketidakadilan Pembangunan Pariwisata, Menjaga Air: Aktivisme dan Sains Warga di Yogyakarta," dalam Sandang dkk., 2024, Ngelep Ngrumat Niteni: Ekologi Poitik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, hlm. 65-91.

55. Wawancara dengan Dua (Nama Samaran), Juni 2024

straksi air tanah menggunakan pompa. Bagi JBO, air itu menjadi komoditas yang mengalir ke kamar-kamar penginapan dan sarana lain sehingga air yang diekstraksi dari tanah lewat pompa atau yang diambil secara langsung dari Gua Pule Jajar sehingga berubah menjadi keuntungan. Tanpa air itu, wisatawan tidak akan mau mengeluarkan uang untuk berkunjung dan menginap di JBO. Berbeda, Kombi mengambil air dari Gua Pule Jajar berlandaskan kegunaan yang memanfaatkan air yang diproduksi oleh alam di sungai bawah tanah Gua Pule Jajar untuk kebutuhan orang banyak dan bukan untuk ditukar sebagai keuntungan.

